

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PERTUMBUHAN
EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, KOMPLEKSITAS
DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KELEMAHAN
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera
Utara Periode 2012-2015)**

Oleh :

Lenni Mustika Sari

Pembimbing : Desmiyawati dan Susilatri

Faculty of Economics and Business Riau University, Pekanbaru Indonesia.

Email : lennimustika29@yahoo.com

*The Influence of Local Government Size, Economic Growth, Region Own Source
Revenue, Regional Complexity, and Capital Expenditure on The Internal Control
Weakness of Regional Government (Empirical Study on Regency and City of
North Sumatera Province Period 2012-2015)*

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of Local Government Size, Economic Growth, Region Own Source Revenue, Regional Complexity and Capital Expenditure On The Internal Control Weakness Of Regional Government. The population in this study are 33 regencies and cities of North Sumatera Province. This research uses secondary data in the form of BPK audit report, Population, PDRB Report, Realization Report of APBD, and data of sub-district. The examination has been done by using SPSS software 17.0 versions i.e. the examination of coefficient determination test, classic assumption test and multiple regressions analysis. The result of coefficient determination test shows that the contribution of all independent variables to dependent variable are 7.8% and the remaining 92.2% are influenced by other variables. The result of t test shows that local government size has no significant effect on the On The Internal Control Weakness Of Regional Government $0.411 > 0.05$. Economic growth has no significant effect On The Internal Control Weakness Of Regional Government $0.806 > 0.05$. Local Revenue has a significant positive effect On The Internal Control Weakness Of Regional Government $0.045 < 0.05$. The Regional Complexity has no significant effect On The Internal Control Weakness Of Regional Government of $0.877 > 0.05$. Capital Expenditure has a significant negative effect On The Internal Control Weakness Of Regional Government $0.040 < 0.05$.

Keywords : Local Government Size, Economic Growth, Region Own Source Revenue, Regional Complexity, and Capital Expenditure.

PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan di Indonesia saat ini menggunakan

sistem Desentralisasi. Dengan adanya sistem desentralisasi ini dapat menunjukkan kepercayaan dari pemerintah pusat bahwa pemerintah

daerah dapat mengembangkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Adanya sistem desentralisasi itu ditandai dengan keluarnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yaitu tentang Pemerintahan Daerah, akan menjadi landasan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi yang semakin besar, melakukan pengawasan yang baik sangat dibutuhkan agar terhindar dari tindak kecurangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP menjelaskan bahwa, pengendalian intern adalah sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atau tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah termasuk salah satu laporan yang diperiksa oleh BPK.

Kasus kelemahan pengendalian internal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara terjadi dikarenakan masih terdapat beberapa catatan BPK, terkait sistem pengendalian yaitu penatausahaan rekening bank yang tidak sesuai ketentuan dan terdapat sisa dana BOS pada rekening penampungan yang belum tersalurkan. Kemudian

kekurangan kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara, dan serah terima aset tetap dalam rangka pengalihan personil, sarana dan prasarana serta Dokumen (P2D) dengan pemerintah kabupaten kota belum dilaksanakan.

Selain itu sistem pengawasan pengendalian internal masih lemah dan rawan terjadinya tindak pidana korupsi dalam kasus suap proyek pengerjaan infrastruktur di kabupaten Batubara, Sumatera Utara tahun 2017 (tempo.co). Selain itu pemerintah provinsi Sumatera Utara meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akan tetapi ada banyak pelanggaran, ketidak disiplin maupun temuan terhadap sistem pengendalian internal dan ketidak patuhan terhadap perundang-undangan. Hal ini menjadi kecurigaan bagi auditor internal sendiri setelah kasus pesanan WTP setelah operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian Desa (news.metro24jam.com).

Terdapat beberapa penelitian mengenai factor kelemahan pengendalian internal salah satunya yaitu penelitian Rachmawati dan Handayani (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan SPI pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2013. Aini (2016) meneliti pengaruh Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), kompleksitas daerah dan belanja modal terhadap kelemahan SPI Provinsi di Indonesia tahun 2011-2012.

Ukuran pemerintah daerah merupakan variabel bebas dalam penelitian ini. Jumlah penduduk menjadi pertimbangan dalam melihat

tingkat kebutuhan pelayanan umum disuatu daerah. Semakin banyak jumlah penduduk disuatu pemerintah daerah berarti semakin banyak dan beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal itu diduga akan menyebabkan meningkatnya masalah kelemahan pengendalian internal.

Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai dengan tingkat PDRB. PDRB yang tinggi mengindikasikan kegiatan ekonomi daerah berjalan dengan baik, dengan begitu nilai pemasukan terhadap pendapatan daerah akan semakin tinggi. Meningkatnya aktivitas ekonomi suatu daerah juga akan mempengaruhi pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah yang dapat meningkatkan angka kecurangan yang terjadi. Pemerintah tidak bisa fokus terhadap pengawasan yang dilakukannya karena begitu banyaknya segmen usaha yang harus mereka awasi. Sehingga diperlukan pengendalian internal yang baik.

Semakin banyak jumlah sumber pendapatan, justru akan membuat masalah pada pengendalian intern (Novilia 2017). Hal ini dikarenakan PAD dapat menjadi sebuah ladang terjadinya tindak kecurangan dan penyelewengan pada pos-pos rawan kecurangan berupa penggunaan uang daerah yang tidak sesuai dengan UU. Sehingga perlunya pengawasan dengan sistem pengendalian internal yang baik.

Tingkat kompleksitas daerah yang semakin tinggi di dalam sebuah organisasi menyebabkan masalah salah satunya adalah pengendalian internal. Organisasi menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengimplementasikan pengendalian intern secara konsisten untuk setiap divisi yang berbeda. Kompleksitas daerah biasanya dapat dilihat dari

jumlah kecamatan. Semakin besar jumlah segmen atau cabang organisasi kasus kelemahan pengendalian internal yang terjadi akan semakin banyak.

Menurut Kristanto (2009) belanja modal merupakan pengeluaran Negara yang digunakan dalam rangka pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari suatu satuan kerja atau dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar anggaran untuk belanja modal pada institusi pemerintah daerah maka risiko kebocoran dari anggaran untuk belanja modal tersebut semakin tinggi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah Ukuran Pemerintah daerah berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah? 2) Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah? 3) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah? 4) Apakah Kompleksitas Daerah berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah? 5) Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah?

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk menguji Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. 2) Untuk menguji Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. 3) Untuk menguji Apakah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. 4) Untuk menguji Apakah Kompleksitas Daerah berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. 5) Untuk menguji Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

TELAAH PUSTAKA

Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian Intern terdiri dari 5 (lima) komponen yang berhubungan, yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan

Menurut (Mulyadi 2014:116), terdapat beberapa unsur pengendalian intern, yaitu sebagai berikut: Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas, Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD tahun 1945 Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemerintah yang independen memiliki tugas untuk mengawasi dan mengaudit lembaga pemerintah serta mengawasi jalannya sistem pengendalian internal dalam organisasi pemerintah. Kelemahan pengendalian intern dinilai BPK melalui tiga aspek, yang dijelaskan sebagai berikut: Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan, Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan APBD, Kelemahan Struktur Pengendalian Intern.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran Pemerintah Daerah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan Pemerintah Daerah (Hartono 2014). Ukuran sebuah entitas dapat dijadikan sebuah gambaran secara umum yang bisa dilihat secara fisik luar organisasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki ukuran lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang besar pula. Besarnya sumber daya yang dimiliki suatu daerah memungkinkan daerah tersebut untuk menerapkan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Hartono (2014) ukuran organisasi atau entitas dalam pemerintah daerah dapat diukur dengan jumlah penduduk. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Hartono (2014) dan Saputro (2015), iya juga menggunakan populasi jumlah penduduk sebagai proksi dari ukuran.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah pengembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan

barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat (Sukirno, 2006: 423). Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja perekonomian, maka dibuat indikator makro yang biasa digunakan sebagai penilaian kinerja perekonomian. Indikator makro tersebut diantaranya adalah PDRB (BPS). PDRB merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi didalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhitungkan kepemilikan (BPS).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Halim dan Kusufi 2012:101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dapat berupa pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari wilayah tersebut (Novilia 2017).

Kompleksitas Daerah

Kompleksitas daerah adalah tingkatan deferensiasi yang ada di

suatu daerah yang dapat menimbulkan suatu konflik yang dampaknya akan mengganggu pencapaian tujuan dari suatu daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya (Hartono 2014). Kompleksitas merupakan tingkatan yang ada dalam sebuah organisasi, diantaranya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis untuk mencapai tujuannya yaitu mengimplementasikan pengendalian internal.

Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akuntansi Standar (BAS), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Menurut Abdullah dan Halim (2006), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kerangka Pemikiran Dan Pengembangan Hipotesis.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern pemerintah daerah

Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, jumlah penduduk menjadi variabel

utama dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Logikanya semakin banyak jumlah penduduk di suatu pemerintah daerah berarti semakin banyak dan beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan demikian akan semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan umum. Maka, semakin besar permasalahan yang ditimbulkan dari daerah tersebut, diduga akan meningkatkan jumlah kelemahan pengendalian intern.

Penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Zaelani (2011) menemukan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kelemahan SPI pemerintah daerah. Iqbal (2016) juga menemukan adanya pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap kelemahan SPI perusahaan.

H₁: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Meningkatnya aktivitas ekonomi bisa meningkatkan angka kecurangan yang terjadi. Pemerintah tidak bisa fokus terhadap pengawasan yang dilakukannya karena begitu banyaknya segmen usaha yang harus mereka awasi. Sehingga menuntut penyesuaian dari pengendalian intern yang dimiliki dan membutuhkan waktu untuk mengimplementasikan prosedur yang baru. Hal ini memungkinkan pengawasan internal menjadi tidak berjalan secara optimal sehingga terjadinya masalah-masalah

dalam organisasi yang menjadikan lemahnya pengendalian intern itu sendiri.

Dalam penelitian terdahulu, Hartono (2014) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kelemahan SPI. Sedangkan Martani dan Zaelani (2011) menemukan hubungan positif signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan SPI.

H₂: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

Menurut (Halim dan Kusufi 2012:101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Semakin banyak jumlah sumber pendapatan, justru akan membuat masalah pada pengendalian internal (Novilia 2017). Hal ini dikarenakan PAD dapat menjadi sebuah ladang terjadinya tindak kecurangan. Kecurangan yang terjadi dalam hal penggunaan pendapatan daerah dapat berupa penggunaan uang daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjurus pada tindak korupsi atau penggelapan.

Penelitian Martani dan Zaelani (2011) yang meneliti pengaruh PAD mempunyai hasil adanya pengaruh positif antara PAD dengan kelemahan SPI. Perlunya pengawasan terhadap pos-pos rawan tersebut dapat dicegah dengan adanya implementasi SPI baik

dari pihak dalam maupun luar organisasi agar meminimalisir tindak kecurangan yang terjadi.

H₃: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

Pengaruh Kompleksitas Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.

Penelitian ini menggunakan jumlah kecamatan sebagai proksi dari kompleksitas daerah. Kecamatan diibaratkan menjadi anak cabang dalam pemerintah daerah kabupaten/kota. Banyaknya jumlah kecamatan yang ada dalam suatu daerah diduga pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan pengendalian intern. Masalah yang biasanya muncul adalah dalam hal penyatuan laporan keuangan (Martani dan Zaelani 2011). Kesulitan ini dialami karena kecamatan memiliki latar belakang yang berbeda antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lainnya dilihat dari berbagai aspek. Penelitian yang dilakukan oleh Fauza (2016) juga menyatakan bahwa kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan SPI pemerintah daerah.

H₄: Kompleksitas Daerah berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.

Menurut Abdullah dan Halim (2006), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal sangat erat kaitannya dengan pengadaan barang fisik atau aset tetap. Semakin banyak jumlah belanja modal yang dimiliki suatu daerah maka alokasi untuk pengadaan aset tetap semakin tinggi. Proyek pengadaan barang ini yang sangat rawan terjadi kecurangan yang merugikan pemerintah.

Penelitian Nurwati dan Trisnawati (2015) menemukan pengaruh signifikan antara belanja modal terhadap kelemahan pengendalian intern. Penelitian dari Rahmawati dan Handayani (2016) yang menyatakan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Secara logika, semakin banyak proyek pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proyek pengadaan tersebut semakin tinggi, sehingga diperlukan pengendalian intern yang memadai.

H₅: Belanja Modal berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 115). Populasi dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2012-2015. Penentuan sampel menggunakan metode bertujuan (*Purpose Sampling*). Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data variabel dependen kelemahan pengendalian internal dalam penelitian ini yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap LKPD 2012-2015 yang telah di audit oleh BPK yang diperoleh dari situs resmi BPK yaitu www.bpk.go.id sebagai indikator kelemahan pengendalian intern karena dalam UU No.15 Tahun 2006 tentang badan pemeriksaan keuangan. Dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Definisi Operasional Variable dan Pengukurannya.

Kelemahan pengendalian internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kelemahan pengendalian internal diukur dengan jumlah item kelemahan SPI yang dilaporkan oleh BPK dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan yaitu:

$$\text{Kelemahan SPI} = \frac{\text{Jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan} + \text{Jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja} + \text{Jumlah kasus kelemahan struktur pengendalian}}{\text{Ukuran Pemerintahan Daerah (X1)}}$$

Ukuran Pemerintah Daerah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan Pemerintah Daerah (Hartono 2014).

jumlah penduduk menjadi variabel dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk menentukan kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang di gunakan oleh Nurwati dan Trisnawati (2015) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Pemerintah Daerah} = \text{Ln (Jumlah Penduduk)}$$

Pertumbuhan Ekonomi (X2)

Pertumbuhan ekonomi adalah pengembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat (Sukirno, 2006: 423). Jadi variabel ini dapat diukur dengan laju pertumbuhan PDRB, yaitu dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu dengan PDRB sebelumnya seperti yang digunakan oleh Martani Zaelani (2011) dengan rumus:

$$PE = \frac{PDRB_{t1} - PDRB_{t0}}{PDRB_{t0}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X3)

Menurut undang-undang No. 33 Tahun 2004, PAD adalah salah satu pendapatan daerah yang diperoleh dengan mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur dengan membandingkan jumlah pendapatan pemerintah daerah sehingga membentuk presentase PAD

(Kristanto, 2009). Oleh karena itu, variabel ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan}} \times 100\%$$

Kompleksitas daerah (X4)

Dalam penelitian ini, kompleksitas dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat beragam factor dengan karakteristik berbeda-beda yang mempengaruhi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Semakin kompleks suatu pemerintahan dalam menjalankan kegiatan akan menyebabkan semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan (Aini (2016)).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini pendekatan terhadap variabel kompleksitas menggunakan jumlah kecamatan sebagai salah satu ukuran kompleksitas pemerintah daerah yang dimiliki dalam suatu Kabupaten dan Kota.

$$\text{Kompleksitas Daerah} = \frac{\text{Jumlah Kecamatan}}{\text{Jumlah Kecamatan}}$$

Belanja Modal (X5)

Menurut Abdullah dan Halim (2006), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Oleh karena itu, untuk variabel ini diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif dalam penelitian ini tergambar dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Pemerintah Daerah (X1)	64	41429.0000	2.1232E6	3.976611E5	4.2404248E5
Pertumbuhan Ekonomi (X2)	64	.0147	.9530	.109631	.1104154
Pendapatan Asli Daerah (X3)	64	.0207	.4062	.069977	.0675827
Kompleksitas Daerah (X4)	64	4.0000	35.0000	13.328125	7.5950165
Belanja Modal (X5)	64	.0589	.4233	.238116	.0763200
Kelemahan Pengendalian Internal (Y)	64	2.0000	20.0000	9.515625	3.3285308
Valid N (listwise)	64				

Sumber : Data Olahan, 2017

Hasil Uji Normalitas Data

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau variabel residual memiliki distribusi normal.

Uji statistik *Nonparametric Kolmogorov Smirnov* (K-S) digunakan dalam penelitian ini. Bila probabilitas signifikansi > 0.05 maka distribusi datanya normal dan jika besarnya nilai signifikansi < 0.05 maka distribusinya tidak normal (Ghozali, 2013: 98). Berikut adalah hasil uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* (K-S):

Tabel 2
Hasil Uji Statistic Non-Parametrik Kolmogrov-Smirnov

Model	Nilai Signifikansi Kolmogorov - Smirnov	Keterangan
1	0.749	Data berdistribusi normal

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai signifikan untuk *Unstandardized Residual* sebesar 0.749, lebih besar dari signifikansi yang diharapkan yaitu 0.05 (0.749 > 0.05), maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas.

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah nilai besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan *Tolerance* > 0.1. Hasil uji multikolinearitas yang dilihat dari nilai besaran *Variance Inflation Factor* dan *Tolerance* ditampilkan dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Ukuran Pemerintah Daerah	.234	4.278	Tidak terjadi multikolinearitas
Pertumbuhan Ekonomi	.940	1.064	Tidak terjadi multikolinearitas
Pendapatan Asli Daerah	.312	3.206	Tidak terjadi multikolinearitas
Kompleksitas Daerah	.562	1.779	Tidak terjadi multikolinearitas
Belanja Modal	.872	1.146	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari semua variabel tersebut semua nilai *Tolerance* berada diatas 0.1 dan nilai VIF dibawah 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari pengaruh multikolinearitas dan layak di gunakan dalam penelitian ini.

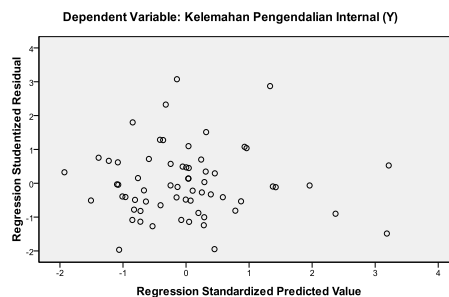
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Maka diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serat titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2013: 105). Hasil uji heteroskedastisitas

yang dilihat pada pola gambar *scatterplot* model dapat dilihat pada gambar 1 :

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Scatterplot



Sumber : Data Olahan, 2017

Dari grafik plot diatas, terlihat bahwa titik titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskidastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Merupakan keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Pada penelitian ini, autokorelasi dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson* yaitu:

Ho: Tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif

Ha: Ada auto korelasi baik positif maupun negative

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin Watson	Keterangan
1	2.182	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai DW (Durbin Watson) adalah sebesar 2.182 sedangkan nilai DL (Durbin Lower) adalah sebesar 1.4322, sedangkan DU (Durbin Upper) adalah sebesar 1.7672. maka pengujian yang sesuai untuk menerima H_0 adalah $du < d < 4 - du = 1.767 < 2.182 < 2.2328$. Berdasarkan hasil pengujian diatas maka H_0 diterima yang berarti dapat disimpulkan sebagai tidak terdapat auto korelasi dalam penelitian ini.

Hasil Uji Regresi Berganda

Digunakan untuk memperlihatkan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Setelah mendapat model penelitian yang baik, maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Tabel 5 akan memperlihatkan hasil dari perhitungan untuk analisis regresi.

Tabel 5
Hasil Uji Analisis Regresi

Model	Variabel	Koefisiensi regresi	Nilai t	Signifikansi
1	(constant)	11.502	6.212	.000
	Ukuran Pemerintah Daerah (X1)	-1.627E-6	-.828	.411
	Pertumbuhan Ekonomi (X2)	.930	.247	.806
	Pendapatan Asli Daerah (X3)	21.821	2.045	.045
	Kompleksitas Daerah (X4)	-.011	-.156	.877
	Belanja Modal (X5)	-11.848	-2.097	.040

Sumber : Data Olahan, 2017

Hasil persamaan regresi dari tabel 4.5 adalah sebagai berikut:

$$Y = 11.502 + (-1.627E-6)X_1 + (0.930)X_2 + (21.821)X_3 + (-.011)X_4 + (-11.848)X_5 + e$$

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis diatas pada tabel 5 menunjukkan bahwa, Ukuran Pemerintah Daerah memiliki nilai regresi negatif dengan nilai t_{hitung} sebesar -0.828 dan nilai signifikan sebesar 0.411. T tabel dengan derajat kebebasan (df) = 64-6, ($t_{tabel} = 2.00172$). Jadi $t_{hitung} (-0.828) < t_{tabel} (2.00)$ dan nilai signifikan (0.411) ≥ 0.05 . hal ini berarti bahwa Ukuran Pemerintah Daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah atau dengan kata lain hipotesis 1 ditolak.

Artinya, jika terjadi kenaikan atau penurunan Ukuran Pemerintah Daerah belum tentu akan menyebabkan naiknya angka Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan ukuran pemerintah yang tinggi belum menjamin pengendalian internalnya juga jauh lebih baik dari pemerintah daerah yang memiliki ukuran pemerintah yang lebih rendah. Sebagian besar daerah memiliki ukuran pemerintah yang cenderung meningkat, namun ukuran pemerintah yang baik belum tentu diikuti dengan peningkatan maupun pengurangan jumlah kasus kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis diatas pada tabel 5 menunjukkan bahwa, Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai regresi positif dengan

nilai t_{hitung} sebesar 0.247 dan nilai signifikan sebesar 0.806. T tabel dengan derajat kebebasan (df) = 64-6, (t_{tabel} = 2.00172. Jadi t_{hitung} (0.247) < t_{tabel} (2.00) dan nilai signifikan (0.806) $\geq$ 0.05. Hal ini berarti bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mempunyai pengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah atau dengan kata lain hipotesis 2 ditolak.

Artinya, jika terjadi kenaikan atau penurunan Pertumbuhan Ekonomi belum tentu akan menyebabkan naiknya angka Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. Oleh karena itu naik atau turunnya Pertumbuhan Ekonomi dalam suatu daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, karena dengan tinggi atau rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dalam suatu daerah akan selalu ada keterbatasan-keterbatasan dalam pencapaian pengendalian internal yang ideal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis diatas pada tabel 5 menunjukkan bahwa, pendapatan asli daerah memiliki nilai regresi positif dengan nilai t_{hitung} sebesar 2.045 dan nilai signifikan sebesar 0.045. T tabel dengan derajat kebebasan (df) = 64-6, (t_{tabel}) = 2.00172. Jadi t_{hitung} (2.045) > t_{tabel} (2.00) dan nilai signifikan (0.045) $\leq$ 0.05. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah atau dengan kata lain hipotesis 3 diterima.

artinya semakin tinggi jumlah pendapatan asli daerah berarti membuat sumber pendapatan asli daerah semakin besar sehingga masalah terkait kelemahan pengendalian internal semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi sebuah ladang terjadinya tindak kecurangan dan penyelewengan pada pos-pos rawan. Kecurangan yang terjadi dalam hal penggunaan pendapatan daerah dapat berupa penggunaan uang daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjurus pada tindak korupsi atau penggelapan. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah pendapatan yang tinggi dan banyaknya pos-pos rawan akan sulit melakukan pengawasan terhadap pendapatan yang diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar PAD akan berpengaruh positif terhadap temuan audit sistem pengendalian internal.

Pengaruh Kompleksitas Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis diatas pada tabel 5 menunjukkan bahwa, kompleksitas daerah memiliki nilai regresi negatif dengan nilai t_{hitung} sebesar -0.156 dan nilai signifikan sebesar 0.877. T tabel dengan derajat kebebasan (df) = 64-6, (t_{tabel}) = 2.00172. Jadi t_{hitung} (-0.156) < t_{tabel} (2.00) dan nilai signifikan (0.877) $\geq$ 0.05. Hal ini berarti bahwa Kompleksitas Daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah atau dengan kata lain hipotesis 4 ditolak.

Artinya bahwa perubahan peningkatan maupun penurunan kompleksitas suatu daerah yang diukur dengan jumlah kecamatan tidak akan mempengaruhi banyaknya kasus Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang terjadi.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis diatas pada tabel 5 menunjukkan bahwa, Belanja Modal memiliki nilai regresi negatif dengan nilai t_{hitung} sebesar -2.097 dan nilai signifikan sebesar 0.040. T tabel dengan derajat kebebasan (df) = 64-6, (t_{tabel}) = 2.00172. Jadi $t_{hitung} (-2.097) < t_{tabel} (2.00)$ dan nilai signifikan ($0.040 \leq 0.05$). Hal ini berarti bahwa Belanja Modal mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah atau dengan kata lain hipotesis 5 diterima.

Artinya bahwa jika Anggaran Belanja Modal yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah besar, maka jumlah kasus Kelemahan Pengendalian Internal akan berkurang. Jumlah Anggaran Belanja Modal yang relatif besar membuat Pemerintah Daerah lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dan mengelolanya. Sehingga Pemerintah Daerah berusaha untuk menerapkan Pengendalian Internal yang baik dan memadai terhadap pengelolaan Belanja Modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil pengujian pertama menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah yaitu dengan nilai $t_{hitung} (-0.828) < t_{tabel} (2.00)$ dan nilai signifikan ($0.411 \geq 0.05$).
2. Hasil pengujian kedua menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah yaitu dengan nilai $t_{hitung} (0.247) < t_{tabel} (2.00)$ dan nilai signifikan ($0.806 \geq 0.05$).
3. Hasil pengujian ketiga menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah yaitu dengan nilai $t_{hitung} (2.045) > t_{tabel} (2.00)$ dan nilai signifikan ($0.045 \leq 0.05$).
4. Hasil pengujian keempat menunjukkan bahwa kompleksitas daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah yaitu dengan nilai $t_{hitung} (-0.156) < t_{tabel} (2.00)$ dan nilai signifikan ($0.877 \geq 0.05$).
5. Hasil pengujian kelima menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negative signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah yaitu dengan nilai $t_{hitung} (-2.097) < t_{tabel} (2.00)$ dan nilai signifikan ($0.040 \leq 0.05$).

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintahan daerah
Agar dapat memperbaiki prosedur pengendalian yang ada

di daerahnya dan meningkatkan pemantauan pengendalian untuk mencegah terjadinya kasus kecurangan.

b. Bagi peneliti selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan sampel dan periode pengamatan yang lebih panjang, sehingga hasil yang diperoleh akan memberikan gambaran kondisi sesungguhnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data primer, seperti kuesioner maupun interview ke kantor pemerintahan atau institusi pemerintahan lain

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy dan Abdul Halim. 2006. Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Pemeliharaan Dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Volume 2, Nomor 2, Hal:17-32
- Aini, Fitriatul. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kompleksitas Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Periode 2011-2012). *JOM Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017. Universitas Riau. Pekanbaru
- Ghozali, Imam. 2013. *Analisis Multivariate Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi keempat. Jakarta: Salemba Empat
- Hartono, Rudi. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Skripsi Sarjana*. FE UNNES. Semarang
- Iqbal, Muhammad. 2016. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Riau Dan Sumatera Barat). *JOM Fekon* Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017. Universitas Riau. Pekanbaru
- Kristanto, Septian Bayu. 2009. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Intern. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*, Volume 9, No. 1
- Martani dan Zaelani. 2011. Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern

- Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*.
- Mulyadi. 2014. *Auditing*. Jakarta. Salemba Empat
- Novilia, fitri. 2017. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Temuan Audit Bpk Atas Sistem Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Tesis*. FEB Universitas Lampung
- Nurwati dan Trisnawati. 2015. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2012). *Syariah Paper Accounting*. FEB UMS.
- PMK No. 91/PMK.06/2007 Tentang *Bagan Akuntansi Standar*
- PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Rachmawati, Dian Eka Dan Nur Handayani. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 4, April 2016, ISSN* : 2460-0585. STIESIA. Surabaya
- Saputro, Eko Adi. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Skripsi sarjana*. FE UNS. Semarang
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke-18. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2013*. www.bpk.go.id diakses pada 17 November 2017.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*
- <http://nasional.tempo.co/read/909240/ott-bupati-batubara-kpk-nilai-pengawasan-intern-pemerintah-lemah/19/11/2017>
- <http://news.metro24jam.com/read/2017/05/31/31877/pemberian-opini-wtp-ke-pemprovsu-mencurigakan/19/11/2017>